

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- M. Abdulkadir. 2004. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah. A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bakhri. 2012. *Hukum Migas*. Yogyakarta: Total Media.
- Arief. N. B. 2014. *Bunga Ramapi Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, D. 2018. *Tindak Pidana di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam*, Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryanto, D. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press.
- Gunawan. 2021. *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda*. Jakarta: Prenada Media.
- Rifa'I, J. I. Et. al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten : PT.Sada Kurnia Pustaka.
- Ibrahim, J. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Efendi, J. & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media Group.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. M. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.
- Muladi & Arief, N. B. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kejahatan dan Penanggulangannya*. Semarang: Penerbit Undip.
- Hisyam, N. 2023. *Asas Proporsionalitas dalam Penjatuh Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik Keadilan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

- Marzuki, M. P. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soesilo, R. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Politeia.
- Simamora. 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan.
- Sunarso, S. 2008. *Tindak Pidana di Bidang Migas dan Energi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto. 2018. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tjakra Negara, S. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilo, S. 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gosen Publishing.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana Formil dan Materiil*. Bandung: CV. Alumni.
- Sugioyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahdeni. 2006. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusaka Publisher.

B. Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN. Nomor 127 Tahun 1958, TLN No.1660.
- Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. LN. Nomor 136 Tahun 2001. TLN. NO. 4152.

C. Skripsi/Thesis/Disertasi

- Halimuddin, A. 2007. Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai, *Skripsi*, Universitas Medan Area. Medan.
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/7105/1/051803019.pdf>
- Munthe, I. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Tidar, U. M. 2021. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang..
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/196002/1/Maria%20Ulfa%20Tidar.pdf>
- Ahmad, N. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS). *Skripsi*, Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.
<https://core.ac.uk/download/pdf/25494119.pdf>
- Azhari, D. W. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin, *Skripsi*, Universitas Medan Area. Medan.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22153>.

D. Jurnal

- Arsyad, A. 2013. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. *Jurnal Inovatif*. Volume 6 (7).
<https://media.neliti.com/media/publications/43235-ID-kebijakan-kriminal-penanggulangan-penyalahgunaan-bahan-bakar-minyak-bbm-bersubsidi.pdf>.
- Abadi, F. B. & Majdid,V. N. 2025. Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. *Jurnal Sakato Ekasati Law Review*. Vol 4 (1).
<https://doi.org/10.31933/yyjwxz87>
- Setiawan, H. *Et.al*. 2021. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika. *Juris Studia*. Volume 2 (2).
<https://doi.org/10.55357/is.v2i2.132>
- Sulaiman, H. & Nento, Z. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. *Journal Law And Justice*. Vol 1(1). <https://doi.org/10.59211/mjplj.v1i1.3>

Benuf, K. & Azhar, M. 2018. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporen, *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Mezak, H. M. 2006. Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum*, Vol 5(3). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam.pdf.

Ardani, N. M. 2019. Peran Kurator Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 6 (1). <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5118>

Nizammudin. 2016. Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5(3). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nizammudin.+2016.+Hak+Menguasai+Negara+Dalam+Sistem+Tata+Kelola+Minyak+dan+Gas+Bumi%3A+Analisis+Putusan+Mahkamah+Konstitusi+Nomor+36%2FPUUX%2F2012%2C+Jurnal+Hukum+dan+Peradilan.+Volume+5%283%29.&btnG=.

Roziqin. 2015. Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan, *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 1(2). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Roziqin.+2015.+Pengelolaan+Sektor+Minyak+Bumi+di+Indonesia+Pasca+Reformasi%3A+Analisis+Konsep+Negara+Kesejahteraan%2C++Jurnal+Tata+Kelola+%26+Akuntabilitas+Keuangan+Negara%2C+Volume+1%282%29.+&btnG=.

E. Internet/Website

Teuku Haris Fadhillah, *Memahami Perbedaan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi*, <<https://www.rri.co.id/lain-lain>. tanggal 1 Desember 2024.> Akses tanggal 12 Mei 2025.